


<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	<div>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA</div>	1721 - A2
	<div>NOMOR : 00/1616520</div> <div><input type="checkbox"/> Pembetulan Ke <input type="checkbox"/> Pembatalan</div>	<div>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN</div> <div><div>0112</div><div>TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN</div><div>2024</div></div>

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN	
A.1 NPWP : 001573609926000	A.5 NAMA JABATAN : Eselon III A
A.2 NIP/ NRP : 198104162006041015	
A.3 NAMA : AGUSTINUS DAMMA RENNA	A.6 JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI - LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
	A.7 NIK : 5312151604810002
A.4 PANGKAT/ GOLONGAN : Pembina Tk.I / IV/b	A.8 STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP <div>K / 3</div>

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <div>21-100-01</div> <div>21-100-02</div>		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA	60.834.600
2.	TUNJANGAN ISTRI	6.083.460
3.	TUNJANGAN ANAK	2.433.384
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	17.640.000
6.	TUNJANGAN BERAS	4.055.520
7.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	284
8.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	162.678.000
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)	253.725.248
PENGURANG		
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN	6.000.000
11.	IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT	3.294.193
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)	9.294.193
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 -13)	244.431.055
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	244.431.055
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)	172.431.000
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	19.864.650
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
21.	PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK	0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)	19.864.650
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	4.072.676
23a.	PPh PASAL 21 DI POTONG	0
23b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	4.072.676
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	15.791.974
24a.	PPh PASAL 21 DI POTONG	0
24b.	PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	15.791.974

C.1 <input type="checkbox"/> DIPINDAHKAN	C.2 <input type="checkbox"/> PINDAHAN	C.3 <input type="checkbox"/> BARU	C.04 <input type="checkbox"/> PENSIUN
--	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK	
D.1 NPWP Instansi Pemerintah	: 001243013926000
D.2 Nama Instansi Pemerintah	: KPU KAB. SUMBA BARAT DAYA
D.3 ID Sub Unit Organisasi	: 670280
D.4 Tanggal	: <div>31</div> <small>dd</small> <div>12</div> <small>mm</small> <div>2024</div> <small>yyyy</small>
D.5 NAMA PENANDATANGAN	: MARLINCE SUSANA MALO
D.6 Pernyataan Wajib Pajak	: Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
<div></div>	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah